OPTIMALISASI CAPAIAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA

Andika Surya Wicaksono
NPP. 33. 1083
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: andikajr767@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Gatiningsih, MT
Email: gatiningsih@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *Digital transformation in population administration services through the Digital Population Identity (IKD) program is expected to improve the effectiveness and efficiency of public services. However, the achievement of IKD activation in Jayapura City has not yet reached the national target. Several obstacles such as limited human resources, inadequate infrastructure, low public digital literacy, and geographical conditions have become challenges in optimizing IKD activation. Previous studies generally focused on implementation and digital public services, while studies that specifically analyze the optimization of IKD activation achievements through the dimensions of input, throughput, and output in Jayapura City are still limited.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze and obtain a clear description regarding the optimization of Digital Population Identity (IKD) activation achievements at the Department of Population and Civil Registration of Jayapura City.* ***Method:*** *This study used a qualitative descriptive method. Data collection techniques were conducted through interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The theory used in this study was the optimization theory proposed by (Mardiasmo 2018) consisting of input, throughput, and output dimensions.* ***Result:*** *The study found that the optimization of IKD activation achievements in Jayapura City has not been fully optimal. In the input dimension, there are still limitations in human resources, facilities, and digital infrastructure. In the throughput dimension, the implementation process of IKD services has been carried out through socialization and direct services to the community, but public understanding and digital literacy are still relatively low. In the output dimension, IKD activation achievements have increased but have not yet reached the national target. Geographical conditions, internet network constraints, and limited community awareness are the main obstacles in optimizing IKD activation.* ***Conclusion****: This study concludes that the optimization of IKD activation achievements in Jayapura City has not run optimally because several supporting factors are still inadequate. Strengthening human resources, increasing digital infrastructure, and optimizing public outreach are needed to improve IKD activation achievements in Jayapura City.*

Keywords: Digital Identity; Optimization; Population Administration; Public Service.

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan melalui program Identitas Kependudukan Digital (IKD) bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Namun capaian aktivasi IKD di Kota Jayapura belum mencapai target nasional. Beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kondisi geografis menjadi tantangan dalam optimalisasi aktivasi IKD. Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada implementasi dan pelayanan publik digital, sedangkan penelitian yang secara khusus mengkaji optimalisasi capaian aktivasi IKD melalui dimensi input, throughput, dan output di Kota Jayapura masih terbatas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai optimalisasi capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Provinsi Papua. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori optimalisasi menurut (Mardiasmo 2018) yang meliputi dimensi input, throughput, dan output. **Hasil/Temuan:** Penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi capaian aktivasi IKD di Kota Jayapura belum berjalan secara optimal. Pada dimensi input masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur digital. Pada dimensi throughput, proses pelayanan dan sosialisasi IKD telah dilaksanakan namun pemahaman serta literasi digital masyarakat masih rendah. Pada dimensi output, capaian aktivasi IKD mengalami peningkatan tetapi belum mencapai target nasional. Kondisi geografis, keterbatasan jaringan internet, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi aktivasi IKD. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi capaian aktivasi IKD di Kota Jayapura belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Diperlukan penguatan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur digital, serta optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan capaian aktivasi IKD di Kota Jayapura.

Kata kunci: Administrasi Kependudukan; Identitas Kependudukan Digital; Optimalisasi; Pelayanan Publik.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi digital dalam berbagai bidang pelayanan publik, termasuk administrasi kependudukan (Whitley et al., 2019). Perubahan yang terjadi adalah peralihan dari cara manual atau konvensional ke sistem digital (Zahro & Wahyuni, 2024). Menurut (Gatiningsih, 2023), data kependudukan yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Program IKD bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan secara digital sehingga pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, cepat, dan transparan (United Nations, 2021). Hal ini sejalan

dengan penelitian Whitley, Gal dan Kjaergaard (2019) dalam jurnal Government Information Quarterly yang menjelaskan bahwa penerapan identitas digital dalam pemerintahan berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik, integrasi data, serta kemudahan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah berbasis digital. Selain itu, penelitian mengenai Advancing E-Governance for Development: Digital Identification and Its Link to Socioeconomic Inclusion menjelaskan bahwa identitas digital memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas e-government, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik, serta mendorong inklusi sosial melalui pelayanan berbasis digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan IKD tidak hanya menjadi bagian dari transformasi digital administrasi kependudukan, tetapi juga mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih inklusif dan modern.

Pelaksanaan program IKD menjadi bagian penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (Joseph, 2013). Kehadiran IKD diharapkan mampu mengurangi penggunaan dokumen fisik, meningkatkan keamanan data kependudukan, serta mempercepat pelayanan administrasi kepada masyarakat. Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) sudah mulai diterapkan di Provinsi dan Kabupaten/kota di seluruh indonesia sejak tahun 2022 (Lisna et al., 2024). Penerapan IKD diharapkan memperkuat transformasi digital layanan publik dan menjadi tonggak penting menuju pemerintahan berbasis elektronik Namun dalam implementasinya, berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi kendala dalam mencapai target aktivasi IKD yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua juga menghadapi tantangan dalam pelaksanaan aktivasi IKD. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, capaian aktivasi IKD belum mencapai target nasional sebesar 30 persen dari jumlah wajib KTP. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana penunjang, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kondisi geografis yang memengaruhi akses pelayanan. Penelitian Van Deursen, A. J. A. M., & van Dijk, J. A. G. M. (2020). menjelaskan bahwa rendahnya literasi digital dan keterbatasan akses teknologi menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan publik berbasis digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi IKD sangat dipengaruhi oleh kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum memahami manfaat dan mekanisme penggunaan IKD sehingga partisipasi masyarakat dalam melakukan aktivasi masih rendah. Kondisi jaringan internet yang belum stabil di beberapa wilayah juga menjadi hambatan dalam proses aktivasi IKD. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Herfina Amalia dan Toni Hartono (2024) yang menjelaskan bahwa implementasi aplikasi IKD masih menghadapi hambatan berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan aplikasi digital serta belum optimalnya proses sosialisasi pelayanan IKD. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi agar capaian aktivasi IKD dapat meningkat dan pelayanan administrasi kependudukan berjalan lebih efektif.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Digitalisasi pelayanan publik melalui program IKD bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Akan tetapi, capaian aktivasi IKD di Kota Jayapura masih belum memenuhi target nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya sarana pendukung, serta kondisi geografis menjadi hambatan dalam optimalisasi aktivasi IKD. Penelitian terdahulu umumnya membahas implementasi kebijakan IKD, pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital, serta pengamanan data pribadi dalam penggunaan IKD. Namun penelitian yang secara khusus mengkaji optimalisasi capaian aktivasi IKD melalui pendekatan input, throughput, dan output di Kota Jayapura masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya belum banyak melihat pengaruh kondisi geografis dan karakteristik masyarakat Papua terhadap pelaksanaan aktivasi IKD.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai optimalisasi capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Provinsi Papua. Penelitian ini penting karena capaian aktivasi IKD di Kota Jayapura belum mencapai target nasional sebesar 30 persen, sehingga diperlukan kajian yang mampu menjelaskan kondisi pelaksanaan program secara faktual melalui dimensi input, throughput, dan output. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mengetahui berbagai faktor yang memengaruhi rendahnya capaian aktivasi IKD, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pelayanan, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kondisi geografis yang memengaruhi akses pelayanan administrasi kependudukan di Kota Jayapura. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivasi IKD.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital, serta transformasi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan IKD di berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi sumber daya manusia, kesiapan pemerintah, infrastruktur digital, maupun tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan layanan digital. Seperti pada penelitian (Aulia & Rahmadanik, 2023) yang menunjukkan bahwa pelayanan IKD telah berjalan cukup baik, tetapi masih menghadapi kendala berupa gangguan sistem dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan layanan digital. Kemudian (Penelitian Permadi dan Rokhman 2023) menunjukkan bahwa implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Banyumas dilakukan sebagai upaya pengamanan data pribadi dalam pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan IKD memberikan manfaat dalam meningkatkan keamanan data kependudukan, namun masih diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan karena pemahaman masyarakat terhadap prosedur aktivasi dan manfaat IKD masih relatif rendah. Penelitian (Sasongko, R. W.2023) mengenai pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa pelaksanaan aktivasi IKD masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital

masyarakat, keterbatasan sarana pendukung pelayanan, serta belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan aplikasi IKD. Kondisi tersebut menyebabkan capaian aktivasi IKD belum berjalan maksimal dan memerlukan peningkatan kualitas pelayanan serta sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat. Permasalahan yang sama juga ditemukan di Kota Jayapura, di mana capaian aktivasi IKD masih belum mencapai target nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak membahas implementasi kebijakan IKD, pelayanan publik digital, pengamanan data pribadi, dan strategi kolaborasi dalam pelaksanaan program IKD. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena secara khusus mengkaji optimalisasi capaian aktivasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Provinsi Papua menggunakan teori optimalisasi Mardiasmo. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pengaruh keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, kondisi geografis, serta rendahnya literasi digital masyarakat terhadap capaian aktivasi IKD di Kota Jayapura.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dari segi fokus penelitian, teori yang digunakan, dan karakteristik objek penelitian. Penelitian ini secara khusus mengkaji optimalisasi capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menggunakan teori optimalisasi (Mardiasmo, 2018) yang meliputi dimensi input, throughput, dan output, sedangkan penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada implementasi kebijakan dan pelayanan publik digital. Selain itu, penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura Provinsi Papua yang memiliki kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur digital, serta tingkat literasi digital masyarakat yang berbeda dibandingkan daerah lain. Penelitian ini juga menyoroti pengaruh kondisi geografis dan keterbatasan jaringan internet terhadap capaian aktivasi IKD, yang belum banyak dibahas pada penelitian terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai optimalisasi capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Provinsi Papua.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam penelitian (Sugiyono, 2018). Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk tidak hanya mengetahui capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara umum, tetapi juga memahami proses pelaksanaan, kendala, serta upaya optimalisasi aktivasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Provinsi Papua. Dengan

demikian, metode deskriptif kualitatif dinilai tepat untuk menggambarkan kondisi pelaksanaan program IKD secara faktual dan kontekstual berdasarkan dimensi input, throughput, dan output. (Mardiasmo, 2018:145-146)

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap pelaksanaan program IKD. Selain wawancara, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pelayanan aktivasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data pendukung yang berkaitan dengan penelitian.

Pengujian keabsahan data merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2018). kemudian (Simangunsong, 2017), menjelaskan pengujian keabsahan data dilakukan melalui proses pemeriksaan data secara cermat, salah satunya dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang valid dan kredibel.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan Penggunaan perangkat lunak NVivo membantu peneliti dalam mengelola, mengorganisasi, mengkodekan, serta menganalisis data kualitatif secara lebih sistematis dan efisien (Zamawe, 2015). NVivo memungkinkan peneliti untuk mengelompokkan data, melakukan proses coding, serta mengidentifikasi tema-tema penelitian secara lebih terorganisasi dalam penelitian kualitatif. Selain itu, software analisis data kualitatif seperti NVivo dapat meningkatkan transparansi, konsistensi, dan sistematika dalam proses analisis data penelitian kualitatif (Paulus et al., 2017). Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Provinsi Papua.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Optimalisasi Capaian Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Provinsi Papua

Penelitian ini menggunakan teori optimalisasi menurut (Mardiasmo, 2018) yang meliputi dimensi input, throughput, dan output untuk menganalisis optimalisasi capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Provinsi Papua. Teori tersebut digunakan karena dinilai mampu menggambarkan pelaksanaan program secara menyeluruh, mulai dari sumber daya yang digunakan, proses pelaksanaan pelayanan, hingga hasil capaian program yang diperoleh.

1.1.1 Input

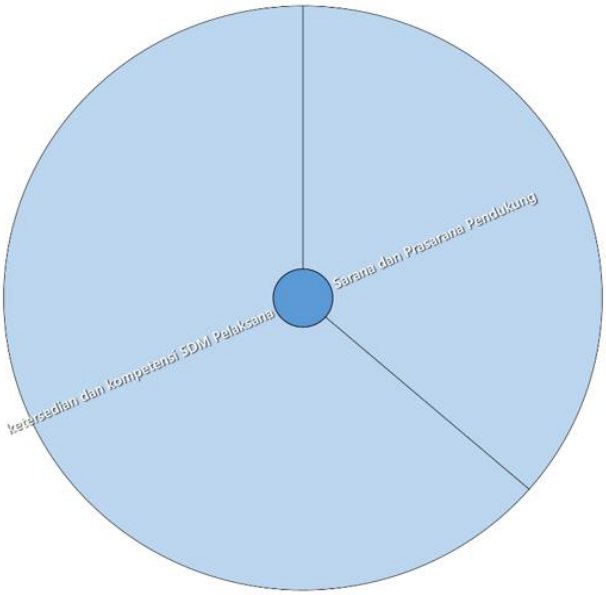

Dimensi input berkaitan dengan seluruh sumber daya yang mendukung pelaksanaan aktivasi IKD, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun kesiapan masyarakat dalam menggunakan layanan digital. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan aktivasi IKD. Jumlah petugas pelayanan yang tersedia belum sebanding dengan jumlah masyarakat yang melakukan pelayanan administrasi kependudukan sehingga menyebabkan proses pelayanan aktivasi IKD belum berjalan secara maksimal. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung pelayanan juga masih belum memadai. Beberapa fasilitas seperti perangkat komputer, jaringan internet, serta perangkat pendukung pelayanan digital masih terbatas sehingga memengaruhi kelancaran proses aktivasi IKD. Kondisi jaringan internet yang tidak stabil juga menjadi kendala dalam proses sinkronisasi data dan penggunaan aplikasi IKD. Temuan ini sejalan dengan pendapat Rifa'i (2019) yang menjelaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan administrasi kependudukan sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, dukungan sarana dan prasarana yang memadai, serta sistem pengelolaan data yang terintegrasi. Pendapat tersebut diperkuat oleh Gatiningsih (2015) yang menyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan administrasi kependudukan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta pengelolaan data kependudukan yang baik. Dengan demikian, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan infrastruktur digital yang masih dihadapi Disdukcapil Kota Jayapura dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital, termasuk dalam pelaksanaan aktivasi IKD. Selain faktor internal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, masyarakat yang berusia lanjut dan masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital juga mengalami kesulitan dalam proses aktivasi IKD. Oleh karena itu, petugas pelayanan harus memberikan pendampingan secara langsung kepada masyarakat saat proses aktivasi dilakukan.

1.1.2 Throughput

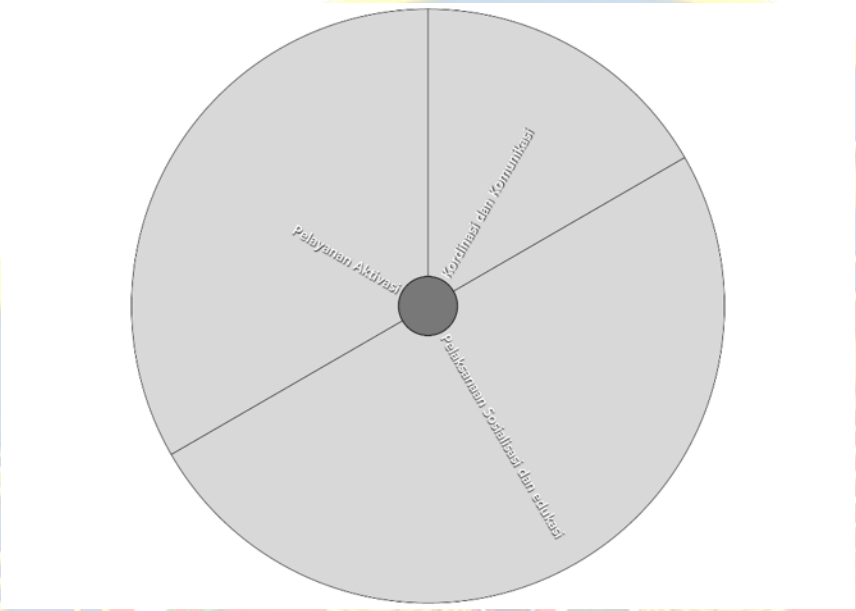

Dimensi throughput berkaitan dengan proses pelaksanaan pelayanan aktivasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura. Berdasarkan hasil penelitian, Disdukcapil Kota Jayapura telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan capaian aktivasi IKD, seperti melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, pelayanan langsung di kantor, pelayanan jemput bola, serta penyebaran informasi melalui media sosial. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat IKD, tata cara aktivasi, serta kemudahan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Selain pelayanan di kantor Disdukcapil, petugas juga melakukan pelayanan jemput bola ke instansi pemerintah, sekolah, kampus, dan tempat pelayanan publik lainnya untuk memperluas jangkauan aktivasi IKD. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, proses pelaksanaan pelayanan masih menghadapi beberapa hambatan. Salah satu hambatan utama yaitu keterbatasan jaringan internet yang memengaruhi proses aktivasi dan penggunaan aplikasi IKD. Selain itu, kondisi geografis Kota Jayapura yang memiliki wilayah cukup luas dan akses yang tidak merata menyebabkan pelayanan aktivasi IKD belum dapat menjangkau seluruh masyarakat secara optimal. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program IKD. Sebagian masyarakat masih belum memahami pentingnya IKD dan menganggap pelayanan administrasi kependudukan digital belum menjadi kebutuhan utama. Kondisi tersebut menyebabkan proses aktivasi IKD berjalan lebih lambat dibandingkan target yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Selain itu, petugas pelayanan juga mengalami kendala ketika masyarakat belum memiliki telepon genggam berbasis android atau perangkat yang mendukung penggunaan aplikasi IKD. Hal tersebut menyebabkan tidak seluruh masyarakat dapat langsung melakukan aktivasi IKD meskipun telah mendapatkan sosialisasi dari petugas pelayanan.

1.1.3 Output

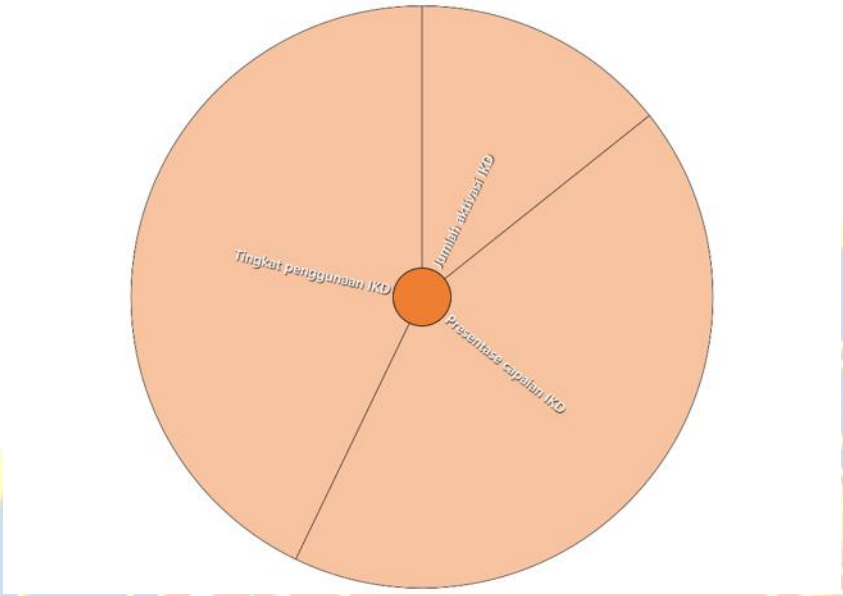

Dimensi output berkaitan dengan hasil capaian aktivasi IKD di Kota Jayapura sebagai bentuk hasil dari pelaksanaan program pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Berdasarkan hasil penelitian, capaian aktivasi IKD di Kota Jayapura mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa program IKD mulai diterima dan dipahami oleh masyarakat sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik. Meskipun demikian, capaian aktivasi IKD di Kota Jayapura masih belum mencapai target nasional sebesar 30 persen dari jumlah wajib KTP. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi aktivasi IKD masih perlu ditingkatkan melalui penguatan berbagai aspek pendukung pelayanan. Peningkatan capaian aktivasi IKD menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mendukung digitalisasi administrasi kependudukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Hutasoit (2017) yang menyatakan bahwa data kependudukan memiliki fungsi strategis sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan pengambilan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan capaian aktivasi IKD menjadi penting untuk mendukung tersedianya data kependudukan yang lebih akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan, penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat masih sangat diperlukan agar target aktivasi IKD dapat tercapai secara maksimal. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelayanan jemput bola dan sosialisasi langsung kepada masyarakat menjadi langkah yang cukup efektif dalam meningkatkan capaian aktivasi IKD. Dengan adanya pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat, proses aktivasi IKD dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat sehingga masyarakat menjadi lebih tertarik untuk menggunakan layanan administrasi kependudukan berbasis digital.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi aktivasi IKD di Kota Jayapura dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, literasi digital masyarakat, serta kondisi geografis. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi IKD sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya dan pemahaman masyarakat terhadap

teknologi digital. Sama halnya dengan penelitian Muhammad Chandra Prayogo dkk, penelitian ini menemukan bahwa koordinasi dan pelaksanaan pelayanan digital masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, penelitian ini memiliki perbedaan karena menyoroti aspek geografis dan keterbatasan infrastruktur digital di Kota Jayapura. Temuan penelitian ini juga memperkuat penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan capaian aktivasi IKD.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kondisi geografis yang memengaruhi akses dan jangkauan pelayanan aktivasi IKD. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rejeki dan Hutasoit (2025) yang menunjukkan bahwa pencapaian target administrasi kependudukan masih menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya sehingga diperlukan upaya yang terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur digital, optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat, serta perluasan pelayanan jemput bola perlu terus dilakukan agar akses masyarakat terhadap layanan IKD semakin mudah dan capaian aktivasi dapat meningkat sesuai dengan target yang ditetapkan.

Keterbatasan penelitian. Penelitian ini terbatas. pada kajian optimalisasi capaian aktivasi IKD di Kota Jayapura sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada daerah lain dengan kondisi geografis dan sosial yang berbeda. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sehingga hasil penelitian sangat bergantung pada kondisi lapangan saat penelitian berlangsung.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih luas mengkaji tentang IKD di wilayah lain dengan pendekatan yang berbeda sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura beserta seluruh jajaran pegawai yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh informan dan pihak-pihak yang telah membantu serta mendukung pelaksanaan penelitian ini hingga selesai.

VI. DAFTAR PUSTAKA

E. A., Gal, U., & Kjaergaard, A. (2019). Realizing digital identity in government: Prioritizing design and implementation objectives for Aadhaar in India. Government Information Quarterly, 36(4), 101442. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101442

Gatiningsih (2023). kebijakan Adminitrasi Kependudukan. Cendekia Press

Gatiningsih. (2015). Identifikasi Data Base Kependudukan Sebagai Produk Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Bandung. Jurnal Dukcapil, 3(2), 107–126. https://eprints.ipdn.ac.id/2404/

Hutasoit, I. (2017). Pengantar ilmu kependudukan. Alfabeta.

Joseph, R. C. (2013). A Structured Analysis of E-Government Studies: Trends and Opportunities. Government Information Quarterly, 30(4), 435–440. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.05.006

Lisna, R., Agus, A., & Nida, U. (2024). Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jurnal Kebijakan Publik, 1(1), 25–30. https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/223

Mardiasmo. (2018). otonomi dan manajemen keuangan daerah. Andi Offset

Paulus, T. M., Woods, M., Atkins, D. P., & Macklin, R. (2017). The discourse of QDAS: Reporting practices of ATLAS.ti and NVivo users with implications for best practices. International Journal of Social Research Methodology, 20(1), 35–47. https://doi.org/10.1080/13645579.2015.1102454

Rifa'i, A. (2019). Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. BANDUNG: CENDEKIA PRESS

Simangunsong, F. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Alfabeta.

Rejeki, W. R. S., & Hutasoit, I. (2025). Pencapaian target nasional pada bidang administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan. Jurnal Konstituen, 7(1). https://doi.org/10.33701/jk.v7i1.5389

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

United Nations. (2021). Advancing e-governance for development: Digital identification and its link to socioeconomic inclusion. Government Information Quarterly, 38(3), 101568. https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101568

Van Deursen, A. J. A. M., & van Dijk, J. A. G. M. (2020). Understanding the digital divide in e-government adoption. Information Systems Frontiers, 22(2), 1–15. https://doi.org/10.1007/s10796-020-10024-5

Whitley, Whitley, E. A., Gal, U., & Kjaergaard, A. (2019). Realizing Digital Identity in Government: Prioritizing Design and Implementation Objectives for Aadhaar in India. Government Information Quarterly, 36(4), 101442. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101442

Zahro, A. A., & Wahyuni, E. S. (2024). Transformasi E-Ktp Menjadi Ktp Digital Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd). Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik), 14(2), 63–71. https://doi.org/10.38156/gjkmp.v14i2.245

Zamawe, F. C. (2015). The implication of using NVivo software in qualitative data analysis: Evidence-based reflections. Malawi Medical Journal, 27(1), 13–15. https://doi.org/10.4314/mmj.v27i1.4

